



Judul : Sepanjang 2025, Komisi II terima 287 aduan mafia
Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Sepanjang 2025 Komisi II Terima 287 Aduan Mafia

KOMISI II DPR menerima 287 laporan terkait sengketa dan masalah pertanahan sepanjang 2025. Jumlah itu jadi yang tertinggi dibandingkan kategori aduan lainnya dari total 671 aspirasi masyarakat yang diterima sepanjang tahun ini.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan, pengaduan terkait pertanahan terdiri dari berbagai kategori. Mulai dari konflik rakyat-korporasi, sertifikat ganda, hingga dugaan praktik mafia tanah di berbagai daerah. "Ini menunjukkan betapa serius dan mendesaknya persoalan ini di negara kita," kata Rifqi.

Banyaknya kasus pertanahan yang masuk memperlihatkan bahwa sistem agraria nasional masih menghadapi persoalan mendalam. Dia menyoroti temuan Panja Penerimaan Negara Bulan Pajak (PNBP) Pertanahan yang mengungkap ketidaksinkronan data antara HGU, HGB, HPL hingga IUP di berbagai lembaga. "Situasi seperti ini membuat mafia tanah mudah bermain dan merugikan masyarakat," jelasnya.

Rifqi juga mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN yang sepanjang tahun ini berhasil menyelesaikan sejumlah kasus besar. Berdasarkan laporan yang diterima komisinya, 90 kasus pertanahan berhasil dituntaskan dari 107 target. Selain itu, 185 terduga mafia tanah diproses, dan 14.315 hektare tanah berhasil diselamatkan.

"Potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp 23,3 triliun. Tapi, kerja ini harus diperkuat, karena mafia tanah bergerak dengan cara-cara yang makin canggih," ucap legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Salah satu kasus yang jadi perhatian besar Komisi II tahun ini adalah terbitnya sertifikat

kepemilikan di wilayah laut atau pesisir, yang dikenal sebagai kasus pagar laut. Rifqi menegaskan, penerbitan sertifikat di wilayah laut tidak memiliki dasar hukum, dan Komisi II meminta ATR/BPN melakukan audit nasional terhadap seluruh sertifikat di pesisir.

"Laut tidak bisa dimiliki pribadi. Kami meminta audit nasional agar kejadian seperti di Tangerang dan Sidoarjo tidak terulang. Negara tidak boleh kalah dari mafia tanah," tegasnya.

Selanjutnya, dia mengingatkan bahwa persoalan pertanahan harus ditangani secara sistemik. Mulai dari penataan data, mempercepat digitalisasi layanan, hingga membuka akses publik melalui Dashboard Pengaduan Pertanahan. "Isu pertanahan bukan hanya soal sengketa, tapi juga soal keadilan agraria, ruang hidup masyarakat, dan penerimaan negara," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II Aria Bima menambahkan, lewat Dashboard Pengaduan Pertanahan masyarakat bisa mengakses DPR tanpa harus langsung masuk ke ruang sidang komisi. Sistem digital ini, kata dia, memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan terkait persoalan pertanahan. "Ini jadi bagian dari respons kami terhadap tuntutan masyarakat," terangnya.

Lewat dashboard tersebut, sambungannya, ada transformasi prosedural dan substansial. Nantinya, pengaduan seputar pertanahan ini akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian ATR/BPN. "Ini sudah kita sepakati dan akan terus kita *review* satu per satu, kasus per kasus, yang kita bisa akses melalui real time," ucapnya. ■ PVB